|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **Informasi**  **(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)** | **Dasar Hukum**  **Pengecualian Informasi** | **Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)** | **Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)** | |
| **Dibuka** | **Ditutup** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dokumen/ Database/Arsip ASN | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h | Tidak Terbatas | Penyalahgunaan oleh  pihak lain | Melindungi  kerahasiaan nominal Rupiah |
| 2 | Daftar Sasaran dan Penilaian Kerja ASN | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i | Tidak terbatas | Mengungkap data pribadi ASN yg bersifat rahasia | Melindurigi data pribadi ASN yang  bersifat rahasia |
| 3 | Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h | Tidak terbatas | Mengurigkap data pribadi ASN yg bersifat rahasia | Melindungi data pribadi Ai3N yang bersifat rahasia |
| 4 | Identitas ASN yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h | Tidak terbatas | Mengungkap data pribadi ASN yg bersifat **rahasia** | Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia |
| 5 | Biodata elektronik ASN  (database) | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h | Tidak terbatas | Mengungkap rahasia pribadi ASN yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia |
| 6 | Nominal Rupiah yang tertera dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa | * UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf I dan huruf j * Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya | Tidak terbatas | Mengungkap rahasia pribadi ASN yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia |
| 7 | Data usulan pengangkatan ASN dalam jabatan struktural | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i | Sampai dengan pelantikan | Merugikan proses penyusurian kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur. | Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja |
| 8 | Arsip dinamis yang menurut  sifatnya rahasia | * UU RI No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 44 * UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i | Tidak terbatas | Merugikan proses  penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur. | Melindungi kerahasiaan dokumen. |
| 9 | Dokumen Rincian HPS (Harga  Perkiraan Sendiri) | * UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf I dan huruf j * Keppres NO. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya | Selama Proses Pengadaan Barang / Jasa | Menghambat  kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur (Informasi apabila buka  menimbulkan penilaian tidak obyektif) | Efisiensi Anggaran  karena diperoleh penawaran harga yang wajar |
| 10 | Dokumen Penawaran Kontrak | Peraturan Presides Republik  Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Casa Pemerintah Pasal 6 Etika Pengadaan. | Selama Proses Pengadaan Barang / Jasa | Muncul Persaingan  usaha yang tidak sehat | Dapat menjaga  Objektifitas penilaian |
| 11 | Hasil Pemeriksaan :   * Pemeriksaan Reguler, * Pemeriksaan Kasus, * Pemeriksaan Khusus, * Review Laporan Keuangan, * Evaluasi/ Pemantauan | UU No. 14 Tahun 2008 pasal 6 huruf c ayat 6 dan pasal 17 huruf i  Peraturan MENPAN No.  PERJ 04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan dan NO.PER/05/M.PAN/03/2008  tentang i5tandar Audit Pengawasan Intern Pemerintah, bab/no.4500  Peraturan Menteri Dalam Negeri No.28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah, Lampiran I bab Norma Pelaporan huruf a. | Tidak Terbatas | * Menghambat kesuksesankebijakan karena adanya pengungkapari secara prematur. * Melanggar PP tentang batasan distribusi LHP.   Melanggar Peraturan **MENPAN** tentang batasan distribusi LHP. | Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan. |
| 12 | Surat Pertanggungjawaban (SPJ} Pelaksanaan Keuangan Daerah yang belum di audit | * UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan hurufj * Keppres NO. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya | Tidak Terbatas | Penyalahgunaan oleh  pihak lain | Melirldungi  kerahasiaan dokumen |
| 13 | Kontrak Kerja Pengadaan  Barang/Jasa. | Perpres Nomor 54 Tahun 2010  Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. | Tidak Terbatas | Penyalahgunaan oleh  pihak lain. | Menjaga kelancaran  pelaksanaan pekerjaan. |
| 14 | Proses Penetapan Keputusan Gubernur Jateng tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan  Pengganti Antar Waktu  Anggota / Pimpinan DPRD Kabupaten/ Kota. | UU 32 tahun 2004, PP 10 Tahun  2010, UU no. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf i | Sampai Penerbitan Keputusan | Akan menghambat  kesuksesan pengambilan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur | Menjaga iklim  kondusif di lingkungan pemerintahan kab/ kota |
| 15 | Jadwal Operasi penegak perda | UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i | Tidak Terbatas | Terjadinya kebocoran Informasi | Menjaga agar operasi berjalan lancer |